

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)**

SKRIPSI



Oleh
PUTRI AYU LESTARI
NIM 105730538615

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)**

SKRIPSI



Oleh
PUTRI AYU LESTARI
NIM 105730538615

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Bicaralah, jika diperlukan

Bergeraklah, karena itu yang diperlukan

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah (riwayat Ibnu Atha’illah As-Sakandari)”.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

1. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan semangat dalam hidupku
2. Kakak dan Adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku
3. Keluarga besarku terima kasih atas semua kasih dan sayangmu.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan (Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)."

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Lestari
No. Stambuk/NIM : 105730538615
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 28 September 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Hj. Naidah, SE., M.Si

NIDN : 0010026403

Pembimbing II

Hasanuddin, SE., M.Si

NIDN : 0901067602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Ismail Basolahi, SE., M.Si. Ak.CA. CSP

NIDN : 0915056601





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Putri Ayu Lestari**, NIM **105730538615** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 168 /Tahun 1441 H/ 2019 M. Tanggal 30 September 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Shafar 1441 H
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM |  |
| | : 2. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si, Ak.CA |  |
| | : 3. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si, Ak.CA |  |
| | : 4. Andi Arman, SE., M.Si, Ak.CA |  |



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Putri Ayu Lestari
- Stambuk : 105730538615
- Progra Studi : Akuntansi
- Dengan Judul : "Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan (Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,


6000
 ENAM RIBURUPIAH
Putri Ayu Lestari

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Ismail Rasulong, SE.MM
 NIDN : 0905107362

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
 NIDN : 0915058801

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan (Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Drs. Rustan dan ibu Wiwie Kusriany, S.Sos yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Hasanuddin, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penuisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sanyat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Muda-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb



ABSTRAK

Putri Ayu Lestari, Tahun 2019. Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan (Studi Kasus di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh diterapkannya Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik kuesioner. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI, Kualitas Laporan Keuangan.



ABSTRACT

Putri Ayu Lestari, 2019. *The influence of accrual-based accounting system to improve the quality of financial statements in government (Case Studies in Biro Pemerintahan Prov. South Sulawesi)*. Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Hj. Naidah and Advisor II Hasanuddin.

This study aims to assess the influence of the accrual-based accounting system to improve the quality of financial statements in the Biro Pemerintahan Prov. South Sulawesi, the methods used in this research are quantitative methods with questionnaire techniques. The results of this study concluded that variables of accrual-based accounting system were positively and significantly influential on the quality variables of financial statements in the Biro Pemerintahan Prov. South Sulawesi.

Keywords: *Acrual Based Accounting System, Quality Financial Report.*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6

A. Tinjauan Teori.....	6
B. Tinjauan Empiris.....	21
C. Kerangka Konsep.....	33
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	34
E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Skor Kuesioner	36
Tabel 4.1	Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	42
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden	43
Tabel 4.3	Pendidikan Responden	43
Tabel 4.4	Masa Kerja Responden	44
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.7	Hasil Uji Model	50
Tabel 4.8	Hasil Uji T (Uji Parsial)	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	41
Gambar 4.2	Hasil Pengujian Normal P-P Plot	49
Gambar 4.3	Hasil Pengujian <i>Scatter Plot</i>	50





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan (Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel)."

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Lestari
No. Stambuk/NIM : 105730538615
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 28 September 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Naidah, SE., M.Si

NIDN : 0010026403

Hasanuddin, SE., M.Si

NIDN : 0901067602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA. CSP

NIDN : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Putri Ayu Lestari**, NIM **105730538615** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 168 /Tahun 1441 H/ 2019 M. Tanggal 30 September 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Shafar 1441 H
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
2. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si, Ak.CA (.....)
3. Andi Arman, SE., M.Si, Ak.CA (.....)
4. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si, Ak.CA (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari

Stambuk : 105730538615

Progra Studi : Akuntansi

Dengan Judul :“Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan (Studi Kasus Di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel).”

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Putri Ayu Lestari

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NIDN : 0905107302

Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. PP No. 71 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh harus di terapkan pada tahun anggaran 2015. Pada tahun 2015 adalah tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tidak terkecuali pada seluruh pemerintah Sulawesi Selatan. Hal tersebut adalah karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi pada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, dan kemudian Permendagri menerbitkan regulasi bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan

informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dampak positif dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak diakui oleh para peneliti. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Deloitte, dalam Asfiansyah (2015), yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besar biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi agar menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya.

Menurut Hasibuan, dalam Pristiani (2015) kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi.

Menurut Robbin, dalam Pristiani (2015) kinerja sebagai fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya dan tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai jika kinerja karyawannya baik.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga

tujuan dapat tercapai. Sujana, dkk (2015) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serta pengkajian yang lebih mendalam, karena bagaimanapun juga manusia yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Menurut Hafid, (2016) yang menyatakan bahwa tingkat efisien yang tinggi ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu SDM yang professional yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru.

Upaya organisasi dalam mendorong pegawainya untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan termasuk di Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan, yaitu upaya agar memiliki SDM yang professional dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, organisasi pemerintahan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan bagi SDM-nya.

Menurut Siagian dalam Apriani (2015); beberapa alasan utama perlunya pengembangan SDM, yakni: 1) adanya pegawai baru yang tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugasnya; 2) pengetahuan pegawai yang perlu pemuktahiran; 3) perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai sosial budaya; dan 4) kemungkinan perpindahan pegawai. Hanya saja untuk menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak saja perlu memiliki keterampilan, tetapi ia juga memiliki keinginan dan semangat untuk berprestasi tinggi. Dengan adanya pegawai yang bekerja secara baik ini, maka di harapkan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya yang diberikan kepadanya.

Ardiansyah (2011) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pelaporan pemerintahan studi kasus pada KPPN Malang. Hasil dari penelitian adalah bahwa penelitian tersebut berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan hubungan komunikasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual. Namun tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah ada pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bagi bidang ekonomi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi jurusan akuntansi yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan. Dan bagi pembaca, menambah wawasan agar bisa mengetahui pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pada Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel.

b. Manfaat Akademik

Peneliti mengharapakan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan menambah wawasan mengenai pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

c. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan bahan masukan mengenai pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Pemerintah memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sistem pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan yang handal dan memadai. Proses maupun sistem dalam pemerintahan tersebut seringkali disebut sebagai akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintah menurut Baswir (2000) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Ghozali, dkk (2008) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*). Nordiawan, dkk (2012) menjelaskan akuntansi pemerintahan menhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Tujuan akuntansi pemerintah menurut Halim, dkk (2012) yaitu; pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Menurut Baswir, karakteristik akuntansi pemerintahan antara lain: (1) Tidak terdapat pencatatan laba rugi karena tujuan utama lembaga penerima bukanlah mencari laba; (2) Tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat; (3) Bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan; dan (4) Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi pemerintah adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.

2. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat lebih terukur kinerjanya. Hal tersebut mampu mendorong efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan

mendorong terwujudnya good corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk memakmurkan rakyat dapat dicapai.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Ritonga (2004) Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut PP No. 71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sesuai dengan SAP Pasal 7, penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis Kas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI sedangkan untuk SAP Berbasis AkruaI berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Perbedaan keempat basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu pengakuan dan pengukuran suatu transaksi.

Tujuan dari penggunaan basis akruaI adalah (a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan); (b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset; (c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; (d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan; (e) Mereformasi sistem anggaran belanja; (f) Transparansi yang lebih luas atau biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IAI-KSAP) pada tahun 2002 telah memilih basis akruaI sebagai dasar pencatatan akuntansi. Basis akruaI mengakui transaksi

dan kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajiban meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya. Dengan basis akrual, organisasi akan mengakui adanya utang, piutang dan aset.

Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya Kementerian Keuangan yang merupakan perangkat pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sebagai perangkat pemerintah pusat memiliki satuan kerja (satker) yang berada di bawahnya. Masing-masing satuan kerja memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Selanjutnya satker mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama-sama dengan unit-unit kerja (subsatker) di bawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah maka setiap satker harus menggunakan dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban

pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrua dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. SAP Berbasis Akrua diterapkan dalam lingkup pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penerapan SAP Berbasis Akrua harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrua. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

Akuntansi berbasis akrua sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan jenis pelaporan,

terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi maupun unsur yang akan dilaporkan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi susunan standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nialinya. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan mempedomani lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Dimensi yang digunakan adalah

- a. Dimensi pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional dan pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Dimensi pengakuan beban dan belanja yang diukur berdasarkan pengakuan beban dan pengakuan belanja.
- c. Dimensi akuntansi persediaan yang diukur dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.
- d. Dimensi akuntansi aset tetap yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan serta depresiasi.
- e. Dimensi akuntansi kewajiban yang ini diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban.
- f. Dimensi laporan operasional yang diukur dengan penyajian laporan operasional.
- g. Dimensi laporan perubahan ekuitas yang diukur dengan penyajian laporan perubahan ekuitas.

Tantangan dalam penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual salah satunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan. Keberhasilan penerapan SAP pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya yaitu sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuannya kuncinya adalah untuk menerima pertanggungjawaban para pengelola dari sisi keluaran dan hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi penerapan kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, penerapan sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan atau program.

3. Sumber daya organisasi

Untuk implementasi program penerapan kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia.

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi penerapan suatu program.

Manfaat dari penggunaan basis akrual (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah; (c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; (d) Standar yang dapat diterima umum; (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran; (f)

Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

Penerapan akuntansi berbasis akrual juga dapat membawa dampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan apabila penerapannya tidak dilakukan dengan baik. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang tidak mudah sehingga kemungkinan kendala dan hambatan akan terjadi, namun disinilah perlunya persiapan yang matang serta mempersiapkan langkah *contingency plan* yang dapat diambil seandainya terjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sehingga tidak berdampak pada penurunan kualitas pelaporan keuangan.

4. Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas.

Mardiasmo dalam Ranilhaj (2016) mengungkapkan bahwa teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan Studi No. 14 yang diterbitkan oleh *IFAC-Public Sector Committee* memberikan

beberapa manfaat penggunaan basis akrual. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk:

- a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas.
- b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan
- c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Tujuan utama sektor publik dan sektor swasta adalah berbeda. Tujuan pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk *cost of service* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian akrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan, perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta lebih memfokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), Di sektor publik orientasi difokuskan optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*). Meskipun terdapat perbedaan tujuan dalam operasional antara sektor publik dan sektor swasta. Namun dari beberapa pengalaman negara Anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* yang telah menerapkan akuntansi

akrual pada sektor publik dan menunjukkan keberhasilan, seperti Kanada, Itali, Inggris, Australia, Finlandia, Islandia, dan Selandia Baru.

Dampak positif dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak diakui oleh para peneliti. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

5. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan semakin besar, terutama mengenai kurang optimalnya atau masih minimnya tingkat produktivitas kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang ramai dibicarakan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, maka produktivitas kerja akan, semakin meningkat, dalam artian aparatur pemerintah akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dan dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaporan keuangan.

Dalam rasa pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, keputusan, dan manfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukakn oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia.

Dalam laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten memiliki semangat tinggi dan menjunjung nilai-nilai sosial agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan terpercaya, dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan SKPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik keualitas laporan keuangan.

Bukti empiris adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemeintah daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

2. Teknologi

Merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem computer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (training), misalnya yang diberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas.

3. Peran PPK-SKPD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, antara

lain: melaksanakan akuntansi SKPD; menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

4. Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel.

5. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitas yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa akademisi dan peneliti pernah melakukan penelitian mengenai kesiapan pemerintah terhadap penerapan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. I Wayan, dkk (2015) meneliti mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kurnia, dkk (2018) meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Gunung Kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Gunung Kidul, (2) Pengujian

hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nyoman, dkk (2016) meneliti mengenai Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil lainnya menunjukkan kompetensi SDM mampu memperkuat pengaruh penerapan sistem akuntansi berbasis akrua, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.

Franta, dkk (2016) meneliti mengenai Pengaruh Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel SAP berbasis Akrua berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (2) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (3) Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB. (4) Pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (5) Pengujian

hipotesis kelima membuktikan bahwa variabel Komitmen Organisasi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB.

I Wayan, dkk (2017) meneliti mengenai Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan tanpa adanya pengawasan dan motivasi dari atasan laporan keuangan yang disusun memperoleh hasil yang lebih baik, dengan adanya sistem pengendalian intern yang mengawasi dan mengarahkan dari pihak *principal* dan *agent* sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya untuk disampaikan dalam penyusunan laporan keuangan, perlu adanya motivasi kerja dalam pembuatan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya dan dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya bagi para penggunanya.

Rizki, dkk (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sarwenda, dkk (2016) meneliti mengenai Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Perilaku Aparatur Dengan Perangkat Pendukung

Sebagai Variabel *Moderating*. Hasil penelitian menemukan bahwa PP No. 71 Tahun 2010 dan SAP berpengaruh signifikan terhadap perilaku aparatur, akan tetapi dengan disertai adanya perangkat pendukung sebagai variabel moderating, maka PP No. 71 Tahun 2010 dan SAP berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selvina, dkk (2015) meneliti mengenai Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menjelaskan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu, peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Yanni, dkk (2018) meneliti mengenai Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah di dukung dengan adanya qanun/peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kabupaten Aceh Tengah.

Risnarningsih (2016) meneliti mengenai Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Hasil penelitian adalah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan

Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual diantaranya : penyusunan standar yang tidak independen, produk hukum yang saling bertentangan, minimnya dukungan politik elit pemerintah, kurangnya respon dari DPR dan masyarakat, kurangnya staf yang berkualitas, kendala reformasi akuntansi pada tingkat pemerintah daerah.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	I Wayan, dkk (2015)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2.	Kurnia, dkk (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi

		Terhadap Kualitas Kab. Gunung Kidul		pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Gunung Kidul, (2) Pengujian hipotesis kedua meunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Nyoman, dkk (2016)	Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil lainnya menunjukkan kompetensi SDM mampu memperkuat pengaruh penerapan

				sistem akuntansi berbasis akrual, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan.
4.	Franta, dkk (2016)	Pengaruh SAP Berbasis Akrual, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel SAP berbasis Akrual berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (2) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (3) Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB. (4) Pengujian hipotesis keempat membuktikan

				<p>bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB, (5) Pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa variabel Komitmen Organisasi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB.</p>
5.	I Wayan, dkk (2017)	Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan tanpa adanya pengawasan dan motivasi dari atasan laporan keuangan yang disusun memperoleh hasil yang lebih baik, dengan adanya sistem pengendalian intern yang mengawasi dan mengarahkan dari pihak <i>principal</i> dan <i>agent</i> sehingga dapat memberikan informasi</p>

				yang sebenarnya untuk disampaikan dalam penyusunan laporan keuangan, perlu adanya motivasi kerja dalam pembuatan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya dan dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya bagi para penggunanya.
6.	Rizki, dkk (2017)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Perangkat Keerja Kota Banda Aceh)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7.	Sarwenda, dkk (2016)	Pengaruh Akuntansi Akrual Terhadap	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa PP

		Perilaku Aparatur Dengan Perangkat Pendukung Sebagai Variabel <i>Moderating</i>		No. 71 Tahun 2010 dan SAP berpengaruh signifikan terhadap perilaku aparatur, akan tetapi dengan disertai adanya perangkat pendukung sebagai variabel moderating, maka PP No. 71 Tahun 2010 dan SAP berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
8.	Selvina, dkk (2015)	Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon	Kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu, peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang

				dimiliki.
9.	Yanni, dkk (2018)	Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah di dukung dengan adanya qanun/peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kabupaten Aceh Tengah.
10.	Risnarningsih	Implementasi Dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI	Kualitatif	Hasil penelitian adalah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual diantaranya : penyusunan standar yang tidak independen, produk hukum yang saling bertentangan, minimnya dukungan

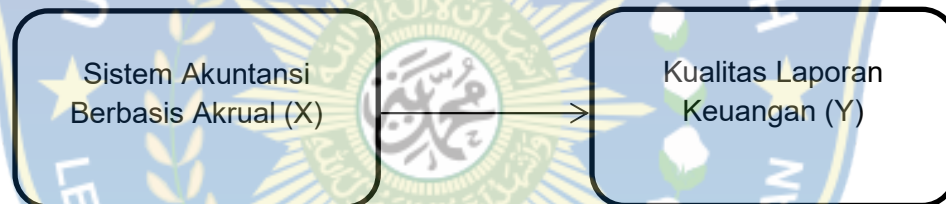
				politik elit pemerintah, kurangnya respon dari DPR dan masyarakat, kurangnya staf yang berkualitas, kendala reformasi akuntansi pada tingkat pemerintah daerah.
--	--	--	--	---



C. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep dan juga didasari oleh penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti mengenai pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kerangka konsep ini menunjukkan bahwa apakah; Variabel Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dalam paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

C. Hipotesis

Hipotesis yang akan dikemukakan untuk penelitian ini adalah :

H_a : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah terkait.

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan yang bertempat di Jl. Urip Sumardjo. Penelitian ini menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 (Dua) bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan September 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada seluruh staf di Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel.

D. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Dalam memudahkan melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian maka dibuat operasional variabel. Sugiyono (2011) variabel merupakan suatu hal dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tersebut lalu ditarik sebuah kesimpulan. Adapun variabel yang ada dalam penelitian terdiri atas dua jenis variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi

Berbasis AkruaI dan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan.

1) Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI (X)

Sistem akuntansi berbasis akruaI adalah suatu proses dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas.

2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menilai sebuah kinerja instansi dengan menggunakan laporan keuangan.

E. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel beserta staf sebagai responden pada Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel yang berjumlah 40 orang.

2) Sampel

Berdasarkan jumlah populasi pada kantor Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah kurang lebih 40 orang dengan menggunakan metode sampling ialah sampel yang mewakili jumlah populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu mengedarkan daftar pertanyaan

terhadap responden yang telah ditentukan. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Pengumpulan data tersebut diukur dengan menggunakan skala *likert* yang telah diberi skoring atau nilai rentang 1-5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Skor Kuesioner

No.	Sikap Responden	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Ragu-ragu	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini memperoleh data mengenai pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, dibuat pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala *likert*. Sudjana (2000) mengatakan bahwa untuk menentukan nilai atau skor dari setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner menggunakan skala *likert*.

Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan maka dilakukan perhitungan rata-rata jawaban berdasarkan skor setiap jawaban dari responden. Dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana sebagai berikut

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

X = sistem akuntansi berbasis akrual

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak.

3. Uji T (Parsial)

Menurut Ghozali (2012) uji *bedat-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel

Berlandaskan hasil rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** sedangkan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
- 2) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- 3) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- 4) Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter.
- 5) Meningkatkan produktivitas manusia dan daya saing produk sumberdaya berkelanjutan.

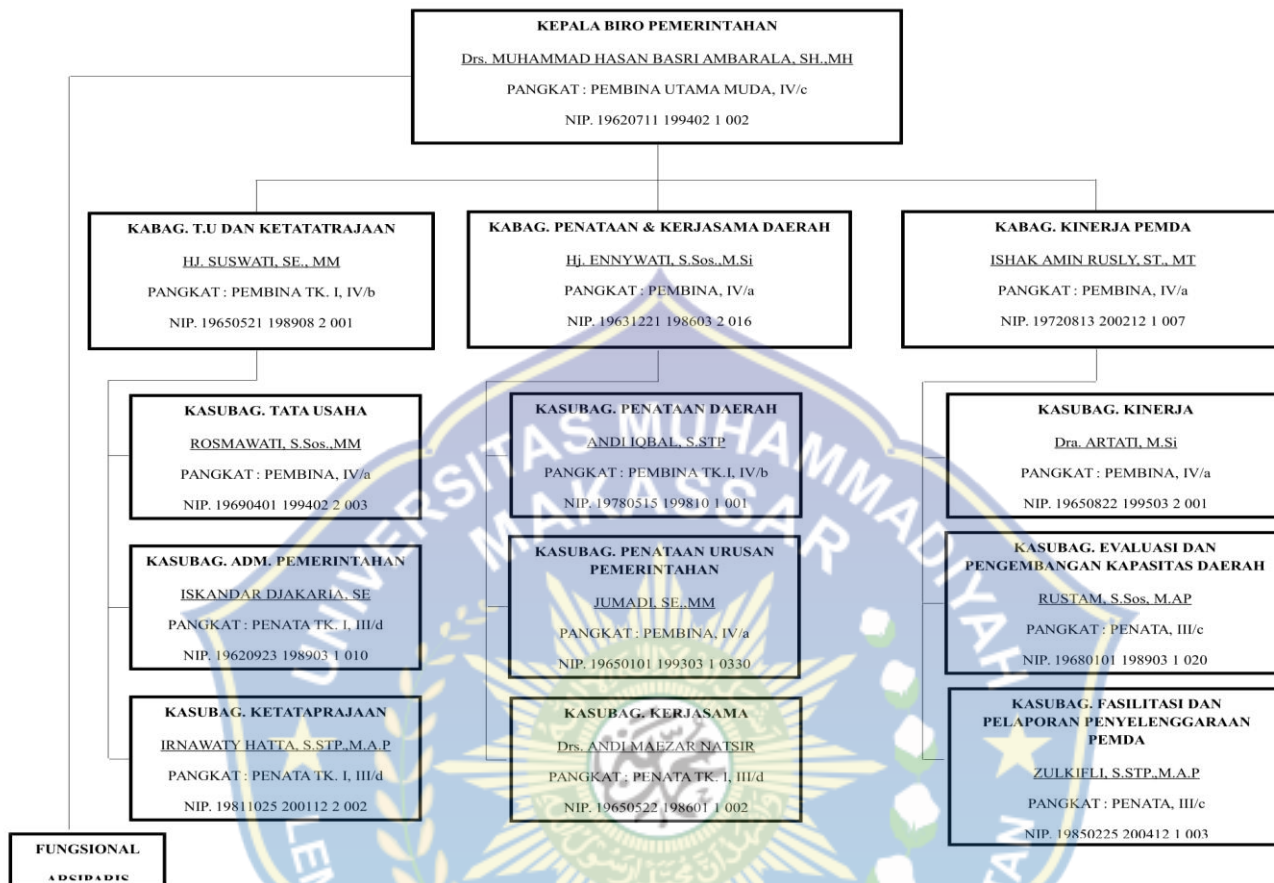
Dari Visi dan Misi tersebut Biro Pemerintahan Setda Prov. Sul-Sel merumuskan bahwa Biro Pemerintahan berada pada misi kesatu yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif”

Misi merupakan pernyataan tindakan yang diemban dan harus dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk dapat merealisasikan visi Biro Pemerintahan Setda Prov. Sul-Sel, dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan fasilitasi dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan kewenangan berotonomi serta harmonisasi mekanisme hubungan kerja perangkat daerah dan kelembagaan daerah antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta antar Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 2) Mengembangkan fasilitasi dalam rangka perwujudan suasana kemitraan antar Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif Daerah secara lebih efektif, efisien, konsisten dan bertanggungjawab dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Mengembangkan fasilitasi dalam rangka perwujudan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju perwujudan akuntabilitas publik;
- 4) Mengoptimalkan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian dukungan, penolakan maupun penundaan pemekaran daerah serta memberi fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab untuk penyelenggaraan awal pemerintahan;
- 5) Meningkatkan fasilitasi, mediasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah baik regional, nasional dan internasional.

2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Sumber : Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel (2019)

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data dan Responden Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Total kuesioner yang dibagikan sebanyak 40, dan total yang dikembalikan oleh responden yaitu 34. Lama pengisian kuesioner adalah satu minggu. Dan jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 kuesioner.

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	40
Kuesioner yang dikembalikan	34
Kuesioner yang dapat diolah	34
Tingkat Pengembalian (<i>Response Rate</i>)	85%

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1, penyebaran kuesioner sebanyak 40 dan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 34 kuesioner. Artinya penyebaran kuesioner yang dapat diolah adalah sebesar 85%. Dari kuesioner yang kembali menandakan pengembalian kuesioner sudah sangat tinggi karena kerjasama yang baik dengan pegawai di Kantor Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel.

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Presentase
Laki-laki	14	41%
Perempuan	20	59%
Jumlah	34	100%

Sumber : Olah Data, 2019

Pada Tabel 4.2 tersebut diatas dapat dilihat, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 14 orang atau dengan nilai presentase sebesar 41% kemudian responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau dengan nilai presentase sebesar 59%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam pengisian kuesioner ini adalah perempuan.

Tabel 4.3

Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	Presentase
S1	22	65%
S2	12	35%
S3	0	0
Jumlah	34	100%

Sumber : Olah Data, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, disimpulkan bahwa jenjang pendidikan responden S1 sebanyak 24 orang atau dengan nilai

presentase sebesar 65%, dan jenjang pendidikan responden S2 sebanyak 12 orang atau dengan nilai presentase sebesar 35%.

Tabel 4.4
Masa Kerja Responden

Lama Bekerja	Absolut	Presentase
≤ 5 Tahun	4	12%
> 5 Tahun	30	88%
Jumlah	34	100%

Sumber : Olah Data, 2019

Pada Tabel 4.4, disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner dengan masa kerja dibawah 5 tahun adalah sebanyak 4 orang atau dengan nilai presentase sebesar 12%, dan responden dengan masa kerja diatas 5 tahun adalah sebanyak 30 orang atau dengan nilai presentase sebesar 88%.

2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada didalam kuesioner mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2001).

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan hipotesis H_0 : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor H_a : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis H_0 dan H_a , kemudian uji dengan membandingkan r hitung (tabel *corrected item-item*

correlation) dengan *r* tabel (tabel *product moment* dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* (df)=N-2, dimana “N” adalah jumlah sampel penelitian sebanyak 34 responden sehingga diperoleh nilai (df)= 34-2 atau nilai df dari 32 adalah 0,339. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila *r* hitung > *r* tabel (Ghozali, 2001). Hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Berbasis Akrua(X) dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No.	Pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1.	Akuntansi berbasis akrual mudah untuk dipahami.	X	0.772	0.339	Valid
2.	Dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini tidak lagi kesulitan.	X	0.708	0.339	Valid
3.	SAP berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan lebih dapat digunakan sebagai informasi dasar penyusunan perencanaan anggaran berikutnya.	X	0.738	0.339	Valid
4.	Penerapan SAP	X	0.471	0.339	Valid

	berbasis akrual akan menambah kesulitan bagi pemda dalam menyusun laporan keuangan.				
5.	Kualitas SDM sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi belum memadai	X	0.577	0.339	Valid
1.	Laporan keuangan yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Y	0.836	0.339	Valid
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu.	Y	0.505	0.339	Valid
3.	Informasi dalam laporan keuangan di instansi tempat saya bekerja telah disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan	Y	0.750	0.339	Valid

	berguna dalam pengambilan keputusan.				
4.	Transaksi yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.	Y	0.765	0.339	Valid
5.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	Y	0.809	0.339	Valid

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item variabel X dan variabel Y menunjukkan data valid, karena memiliki nilai di atas 0,339 baik untuk semua item variabel X dan variabel Y.

3. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas untuk semua variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

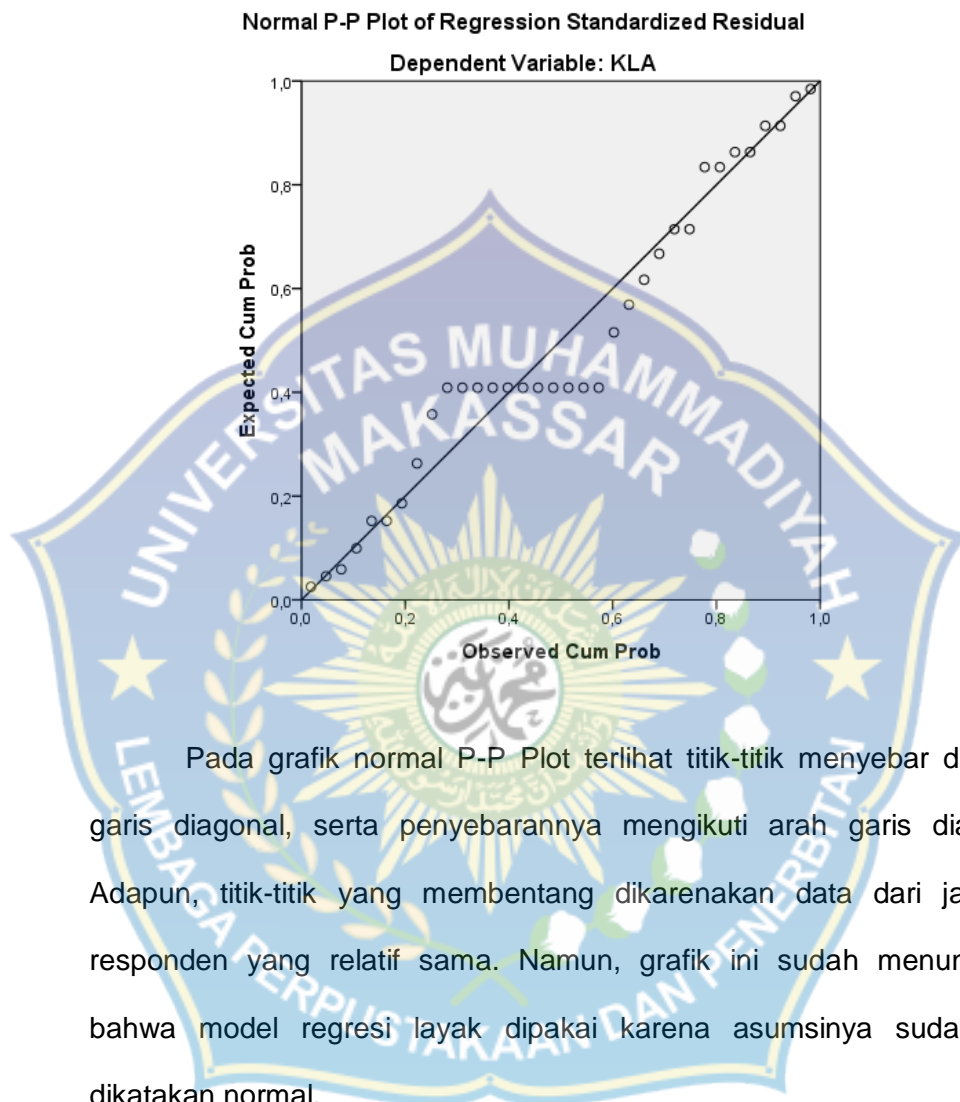
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
KLA		
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98473193
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,143
Test Statistic		,181
Asymp. Sig. (2-tailed)		,006 ^c

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, diketahui bahwa besarnya nilai *test statistic kolmogorov-smirnov* adalah 0.181.

Hasil pengujian tersebut dapat juga dilihat pada gambar uji normalitas P-P Plot dibawah ini:

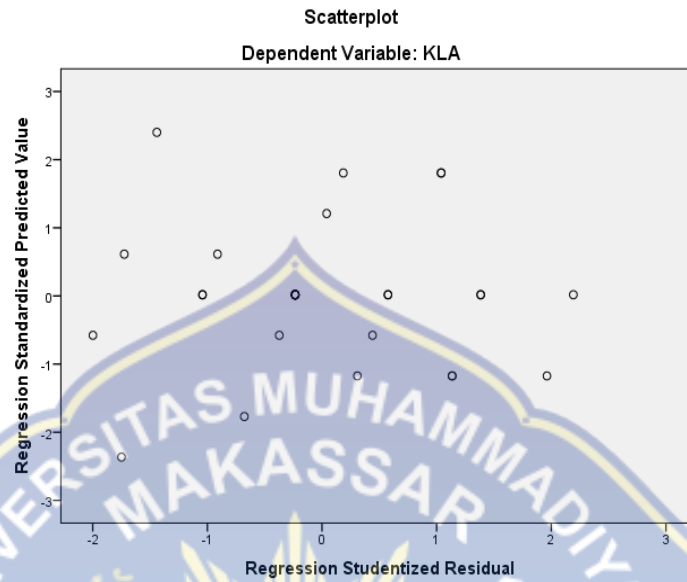
Gambar 4.2
Hasil Pengujian Normal P-P Plot



Hasil normalitas terhadap penyebaran data juga dapat dilihat pada gambar *scatter plot* dibawah ini:

Gambar 4.3

Hasil Pengujian Scatter Plot



4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis tersebut, terdiri dari:

- a. Hasil Uji Model

Tabel 4.7

Hasil Uji Model

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,748 ^a	,560	,546	1,25506

a. Predictors: (Constant), SIABA

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas nilai R Square sebesar 0.560 atau dapat dijelaskan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel X (sistem akuntansi berbasis akrual) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan) sebesar 56%, sedangkan 44% tidak dapat dijelaskan melalui variabel ini atau dipengaruhi oleh variabel lain.

b. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Uji T (uji parsial) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2012). Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Uji T (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3,668	2,608		1,406	,169
	SIABA	,831	,130	,748	6,385	,000

a. Dependent Variable: KLA

Berdasarkan hasil uji t diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar $0.000 < 0.05$ dan t hitung $6.385 > t$ tabel 1.694 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Persamaan regresi $Y=3.668+0.831X$, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 3.668 yang berarti bahwa jika variabel sistem akuntansi berbasis akrual sama dengan nol maka peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 3.668.
2. Koefisien X (sistem akuntansi berbasis akrual) sebesar 0.831 yang merupakan nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi berbasis akrual (X) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) artinya jika penerapan sistem akuntansi berbasis akrual mengalami kenaikan satu satuan, maka kualitas laporan keuangan

akan mengalami peningkatan sebesar 0.831 atau 83.1% koefisien bernilai positif artinya antara sistem akuntansi berbasis akrual (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) hubungan positif.

C. Pembahasan

Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan.

Berdasarkan hasil hipotesis yang sudah diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan. Dan ini juga berarti bahwa kantor Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan sudah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis akrual yang sudah diterapkan pada tahun anggaran 2015. Tujuan diterapkannya basis akrual adalah untuk mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Wijayanti (2017).

Hal ini berarti bahwa ketika sistem akuntansi berbasis akrual semakin baik, maka semakin berkualitas juga laporan keuangan yang disajikan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki, dkk (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP Berbasis Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Biro Pemerintahan Prov. Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini bermakna bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan penulis terkait dengan hasil penelitian ini:

1. Penulis berharap kepada seluruh pegawai untuk perlu meningkatkan motivasi dan kedisiplinannya dengan baik pada Setda Biro Pemerintahan Prov. Sul-Sel sehingga dapat meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul yang serupa, peneliti menyarankan untuk menambah variabel-variabel independen penunjang lainnya yang belum dibahas oleh peneliti dan diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, Nyoman Triyadi., dkk. 2016. *"Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, TI, dan SPIP Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi"* E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5.
- Biduri, Sarwenda., dkk. 2016. *"Pengaruh Akuntansi Akrual Terhadap Perilaku Aparatur Dengan Perangkat Pendukung Sebagai Variabel Moderating"* Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Mei.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Eveline, Franta., dkk. 2016. *"Pengaruh SAP Berbasis Akrual, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana"* Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 16, No. 1, April.
- Kurniawan, Yudhi., dkk. 2016. *"Sistem informasi Akuntansi Berbasis Akrual Solusi E-government untuk Tata Kelola Keuangan Daerah"* SNIK, Oktober.
- Mardiana, Rizki., dkk. 2017. *"Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan"* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 2.
- Putra, I Wayan., dkk. 2015. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual"* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13, No. 1.
- Rahmah, Kurnia., dkk. 2018. *"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Gunung Kidul"* Jurnal Kajian Bisnis, Vol, 26, No. 2, Juli.
- Risnarningsih. 2016. *"Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual"* Jurnal EKSIS, Vol. XI, No. 2, Oktober.
- Riyanto., dkk. 2015. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual: Dilengkapi dengan praktek dan simulasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Setiawan, I Wayan Nico., dkk. 2017. *"Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan"* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21, No. 1, Oktober.
- Sitorus, Selvina., dkk. 2015. *"Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon"* Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, Maret.

Suryanto. 2017. *“Tinjauan implementasi Akuntansi Berbasis Pemerintahan Berbasis Akrual Di Indonesia”* Jurnal AdBispreneur, Vol. 2, No. 3, Desember.

Syahrienda, Yanni., dkk. 2018. *“Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah”* Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 4, No. 1, Maret.



L

A



M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

A. Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :**“Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan”**, dengan melakukan studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Data Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* (✓) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
4. Lama Waktu Kerja : ≤ 5 Tahun > 5 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : SMP/SMA Diploma
 S1 S2
 S3
6. Latar Belakang : Akuntansi Manajemen
Pendidikan Ilmu Ekonomi Hukum
 Teknik Pertanian
 Dan lain-lain

7. Jabatan :

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu kolom yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu.

Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RR : Ragu-Ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



1. Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI (X)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Akuntansi berbasis akrual mudah untuk dipahami.					
2.	Dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini tidak lagi mengalami kesulitan.					
3.	SAP berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan lebih dapat digunakan sebagai informasi dasar penyusunan perencanaan anggaran berikutnya.					
4.	Penerapan SAP berbasis akrual akan menambah kesulitan bagi pemda dalam menyusun laporan keuangan.					
5.	Kualitas SDM sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi belum memadai.					



2. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Relevan						
1.	Laporan keuangan yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.					
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu.					
3.	Informasi dalam laporan keuangan di instansi tempat saya bekerja telah disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
Andal						
4.	Transaksi yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
Dapat Dibandingkan						
5.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

Lampiran 2 : Matriks Tabulasi Data

NO.	Sistem Akuntansi Berbasis Akrual					Total	Kualitas Laporan Keuangan					Total
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5		X	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
10	3	4	4	4	4	19	3	2	4	4	4	17
11	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
13	4	5	4	3	4	20	5	4	5	4	4	22
14	5	5	5	4	4	23	5	4	5	5	5	24
15	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	5	22
16	4	4	3	3	4	18	4	4	4	3	4	19
17	4	3	4	3	3	17	4	4	3	2	4	17
18	5	4	5	4	5	23	5	4	5	5	5	24
19	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	22
20	4	4	5	3	4	20	4	4	4	3	4	19
21	4	4	5	3	3	19	4	4	4	3	4	19
22	4	4	5	3	5	21	4	4	4	3	4	19
23	4	4	4	3	5	20	4	4	4	5	4	21
24	4	4	4	4	2	18	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	3	5	20	4	4	4	4	4	20
26	3	3	3	3	4	16	3	3	3	3	3	15
27	5	5	5	4	5	24	5	4	4	4	5	22
28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
30	4	4	5	3	4	20	5	4	4	5	5	23
31	4	3	4	3	4	18	4	5	4	4	4	21
32	5	4	5	4	5	23	5	4	4	5	5	23
33	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20

Lampiran 3 : Olah Data SPSS 24

1. Hasil Uji Validitas

Validitas X

		Correlations					
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	TOTAL X
X.1	Pearson Correlation	1	,459**	,556**	,252	,337	,772**
	Sig. (2-tailed)		,006	,001	,150	,052	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X.2	Pearson Correlation	,459**	1	,423*	,320	,207	,708**
	Sig. (2-tailed)	,006		,013	,065	,240	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X.3	Pearson Correlation	,556**	,423*	1	,155	,228	,738**
	Sig. (2-tailed)	,001	,013		,381	,194	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X.4	Pearson Correlation	,252	,320	,155	1	-,064	,471**
	Sig. (2-tailed)	,150	,065	,381		,717	,005
	N	34	34	34	34	34	34
X.5	Pearson Correlation	,337	,207	,228	-,064	1	,577**
	Sig. (2-tailed)	,052	,240	,194	,717		,000
	N	34	34	34	34	34	34
TOTAL X	Pearson Correlation	,772**	,708**	,738**	,471**	,577**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,005	,000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas Y

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,372'	,477"	,443"	,781"	,836"
	Sig. (2-tailed)		,030	,004	,009	,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
Y.2	Pearson Correlation	,372'	1	,322	,096	,174	,505"
	Sig. (2-tailed)	,030		,064	,590	,326	,002
	N	34	34	34	34	34	34
Y.3	Pearson Correlation	,477"	,322	1	,566"	,446"	,750"
	Sig. (2-tailed)	,004	,064		,000	,008	,000
	N	34	34	34	34	34	34
Y.4	Pearson Correlation	,443"	,096	,566"	1	,568"	,765"
	Sig. (2-tailed)	,009	,590	,000		,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
Y.5	Pearson Correlation	,781"	,174	,446"	,568"	1	,809"
	Sig. (2-tailed)	,000	,326	,008	,000		,000
	N	34	34	34	34	34	34
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,836"	,505"	,750"	,765"	,809"	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34	34

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

KLA

N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98473193
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,143
Test Statistic		,181
Asymp. Sig. (2-tailed)		,006 ^c

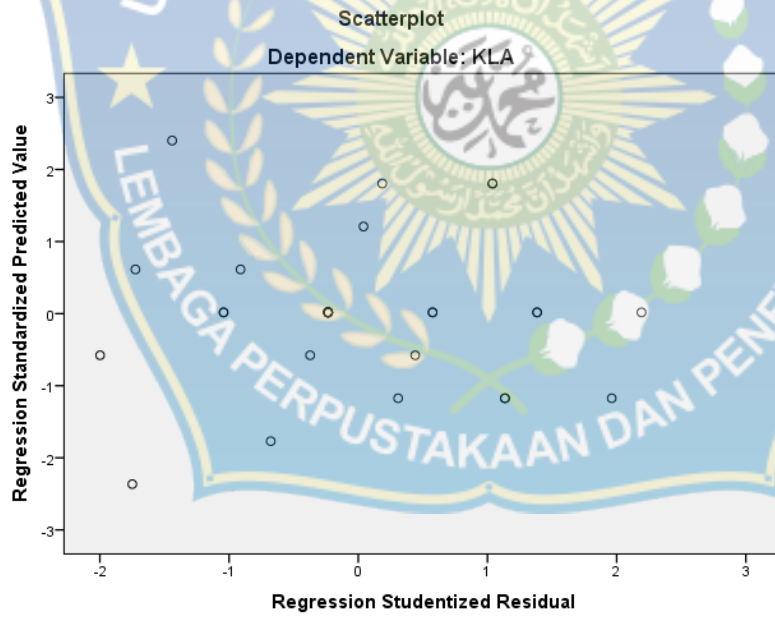
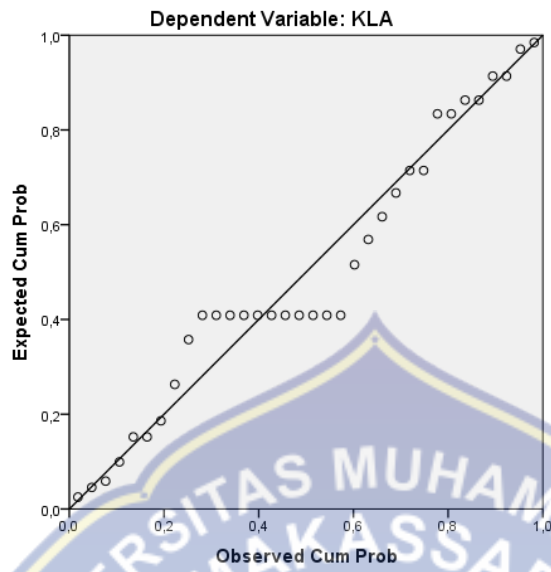
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



3. Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,748 ^a	,560	,546	1,25506

a. Predictors: (Constant), SIABA

b. Dependent Variable: KLA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,668	2,608		1,406	,169
	SIABA	,831	,130	,748	6,385	,000

a. Dependent Variable: KLA

BIOGRAFI PENULIS



Putri Ayu Lestari panggilan Putri lahir di Makassar pada tanggal 04 Oktober 1997 dari pasangan Bapak Drs. Rustan dan Ibu Wiwie Kusriany, S.Sos. Peneliti ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Komp. YPPKG BLOK K 14 No. 24 RT/RW 004/001 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Paccerakkang lulus tahun 2009, SMP Negeri 25 Makassar lulus tahun 2012, SMA Negeri 18 Makassar lulus tahun 2015 dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).